

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA;
Studi Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang
- Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat**

**(*SOCIAL EMPOWERMENT IN BORDER AREA ; Study of problems, needs and
Resources in Jagoi village, District Jagoi Babang, Municipality Bengkayang, West
Kalimantan*)**

Sutaat¹

Abstrak

Daerah perbatasan diharapkan sebagai beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Kenyataan menunjukkan bahwa daerah perbatasan sering identik dengan daerah tertinggal. Oleh karena itu memerlukan upaya-upaya intervensi yang menyeluruh, agar daerah perbatasan benar-benar sebagai beranda depan negara. Terkait dengan ini diperlukan langkah awal indentifikasi kondisi daerah tertinggal sebagai dasar penentuan program pembangunan yang responsif dan sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif mencoba memaparkan permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya di daerah perbatasan, khususnya di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sumber-sumber pelayanan masyarakat yang bisa diakses penduduk umumnya masih sangat terbatas; 2) kemampuan penduduk untuk mengelola sumber daya alam (pertanian dan perkebunan) belum cukup memadai; 3) sumber daya sosial khususnya yang didasarkan pada keagamaan belum mampu didayagunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; dan 4) masih minimnya infrastruktur fisik desa menjadi penghambat kemajuan desa. Berdasarkan hal itu tulisan ini mengajukan saran beberapa program pembangunan yang perlu diluncurkan di wilayah perbatasan.

Kata kunci: masalah kesejahteraan sosial, sumber daya, pemberdayaan masyarakat

Abstract

Border area between two countries must be as a front gate in terms of economic and business affairs among those two countries. However, there is a reality that border area identic to isolated area. Hence, it seen as important to interven those area to gain a good front window of a state. Based on that, it needs to be identified how to condition of those area. By qualitative methods, the research have tried to show the problem, needs, and resources within the area, exactly in Jagoi Village, district Jagoi Babang, bengayang municipal. The research result shows: 1). There is limited resources; 2). Insufficient skill; 3). Social resources incapable to solve social problem; and 4). Limitation of infrastructure. Based on those finding, the author gives some recommendation to conduct some activities.

Keywords: social welfare problems, resources, social empowerment

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan adalah wilayah darat dan kawasan perbatasan laut termasuk kabupaten/kota yang secara geografis dan pulau-pulau kecil terluar (UU 26/2007, tentang demografis berbatasan langsung dengan Penataan Ruang). Ada 38 wilayah kabupaten perbatasan di Indonesia, yakni 27 wilayah di perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan antaranya termasuk daerah tertinggal. Sebagai

¹. Peneliti Madya pada Puslitbang Kesos, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosail, Kementerian Sosial, E-mail:ksutaat@yahoo.com

daerah tertinggal, ciri utamanya adalah kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibanding wilayah lainnya.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan, menurut beberapa literatur adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya; termasuk kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan.

Pendekatan yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan sering mencampur-adukan antara masalah kedaulatan dengan masalah kewilayahan. Untuk itu maka pendekatan "*security approach*" perlu diubah kepada konsep "*prosperity approach*" yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Diharapkan masyarakat perbatasan akan semakin kuat rasa identitas kebangsaan sebagai bagian dari NKRI.

Memperhatikan permasalahan perbatasan tersebut, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 lebih ditekankan pada upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan, yakni sebagai pintu masuk gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan diharapkan sebagai beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Merespon berbagai hal tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010

membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP ini bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan di daerah perbatasan yang dikelola oleh berbagai sektor. Di sektor sosial, dalam penanganan permasalahan sosial diperlukan upaya yang sistematis dan tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan bila didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan reliable sesuai dengan kondisi obyektif wilayah perbatasan. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan reliable, akan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan masyarakat wilayah perbatasan.

Ada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk wilayah perbatasan, salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang ini sebelumnya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sambas. Pada tahun 1999 dilakukan pemekaran Kabupaten Sambas menjadi dua kabupaten (Sambas dan Bengkayang) dan satu kota (Singkawang). Sebagai sebuah kabupaten pemekaran, Bengkayang juga melakukan pemekaran wilayah dari 8 (delapan) kecamatan sebelumnya, menjadi 17 kecamatan, termasuk Kecamatan Jagoi Babang yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Seluas.

Sebagai kabupaten baru, Bengkayang masih mengalami berbagai kekurangan baik yang terkait dengan data base bagi perencanaan pembangunan, maupun masalah kebutuhan SDM yang memadai. Fenomena yang menyertai kabupaten baru adalah masih terbatasnya infrastruktur yang dibutuhkan, baik masalah perhubungan antar wilayah maupun sarana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, terutama guna menunjang rancangan program sosial bagi wilayah perbatasan terutama program pemberdayaan masyarakat, maka Puslitbang Kesejahteraan Sosial melakukan studi tentang masalah, kebutuhan dan sumber daya sosial di daerah perbatasan.

Daerah Perbatasan

Pengertian daerah perbatasan bisa berarti suatu wilayah yang berada di perbatasan antar daerah dalam satu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara. Pada wilayah seperti ini komunikasi atau interaksi antar penduduk di dua daerah atau dua negara yang berbatasan biasanya cukup intensif. Pengertian daerah perbatasan menurut UU no. 26 Tahun 2007 (Dr. Suprayoga Hadi, Bappenas, Maret 2010), adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Di 38 Kabupaten/kota perbatasan prioritas terdapat 60 pulau dari keseluruhan 92 pulau kecil terdapat (65 %); 20 pulau berpenghuni dan 40 lainnya tidak berpenghuni.

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini berubah orientasinya, dari *“inward looking”* menjadi *“outward looking”* sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sedangkan pendekatannya selain keamanan, juga pendekatan kesejahteraan. Terkait dengan hal program-program bidang kesejahteraan

sosial (Kementerian Sosial) untuk wilayah perbatasan kurun waktu tahun 2010 - 2014 meliputi: 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang berfokus pada permukiman dan penyediaan infrastruktur; 3) Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS termasuk Anak, Lansia dan Paka.

Merespon perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan, saat ini di beberapa provinsi dan kabupaten perbatasan telah membentuk lembaga khusus yang bertugas dalam pengembangan wilayah perbatasan. Di lingkungan Kementerian Sosial sendiri dikembangkan pola konsentrasi pembangunan kesejahteraan sosial, pada mana masing-masing unit terkait mencurahkan program pengembangan wilayah perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Apabila rencana dan program seperti disebutkan pada uraian di atas dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah perbatasan, maka diharapkan semua wilayah perbatasan dapat menjadi *“show window”* bagi Indonesia.

Masalah Kesejahteraan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan keadaan berfungsinya perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat atau lembaga sosial. Orang yang bermasalah adalah orang yang mengalami hambatan untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Menurut salah satu pakar kesejahteraan sosial, yaitu *Teare & Mc Pheeters, Social welfare problem is an alternation in the status of functioning (movement toward disfunction) of individual, groups, or institution, in one or more domains of living, brought about or made worse by any one or several obstacles to optimum functioning* (Du Bois B & Miley, 2005).

Faktor penyebab masalah tersebut baik internal maupun eksternal. Faktor internal bersumber dari perorangan, kelompok atau masyarakat sendiri, seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak punya keterampilan, pemilikan aset (tanah, barang-barang produktif lainnya) yang kurang, melemahnya modal sosial dan lainnya. Faktor eksternal, antara lain bersumber pada sistem sosial yang secara potensial menimbulkan ketimpangan struktural dalam masyarakat, dan menyebabkan mereka bermasalah, seperti karena kesempatan, dan peraturan-peraturan yang tidak memfasilitasi masyarakat.

Faktor eksternal lainnya, termasuk intervensi pemerintah, lembaga pemerintah, dan pengusaha swasta. Menurut Dove (dikutip oleh Indah dkk, 2006) bahwa intervensi program dari pemerintah yang pada awalnya bertujuan intervensi pemecahan masalah, ternyata justru menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, dan/atau menimbulkan suatu jenis masalah yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat.

Setiap masyarakat mempunyai cara sendiri dalam mengatasi masalahnya melalui pengelolaan sumber-sumber pendukung lembaga tersebut. Atau dengan menerima uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya. Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada pada diri mereka. Menurut Kuntjaraningrat, kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (Koentjaraningrat, 2004).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber (Edy Suharto, 2005) pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), tetapi juga keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang mempunyai kualitas SDM yang cukup memadai, akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain itu nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kerangka demikian diperlukan langkah-langkah positif, dan tidak hanya menciptakan iklim dan suasana. Upaya ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses

kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menurut Chaskin, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (*community capacity building activities*) mencakup tiga tipe (Chaskin, 2001), yaitu: 1) *development of skills-learning and training opportunities for individuals and groups, and sharing through networks and mutual support*; 2) *development of organizational structures and strengths of community groups and network*; and 3) *development of support to enable the development of skills and structures. Community capacity building then face great challenges in trying to act on two fronts at once: striving to enhance the capacities of social and institutional actors locally while strengthening their relationships with actors outside the community.*

Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting dalam pemberdayaan. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Friedmann (Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, 1996) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning.*

Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu:

(1) Menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya adalah dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) tentang potensi yang dimiliki; (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*strengthening*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya; (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Apakah berupa advokasi sosial, atau dukungan peraturan perundangan yang memihak golongan lemah.

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan intervensi dari luar, tetapi melibatkan pula potensi dan sumber daya masyarakat yang mungkin untuk dikembangkan. Upaya pemberdayaan haruslah responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa upaya pemberdayaan dapat dirancang dengan baik apabila didukung oleh data dan informasi yang akurat tentang kondisi obyektif suatu masyarakat.

Hingga kini data dan informasi tentang kondisi daerah perbatasan masih sangat terbatas. Banyak hal yang belum terpapar secara jelas dan lengkap tentang kondisi daerah perbatasan, baik menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial, sumber daya, maupun kebutuhan

masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah masih mengalami hambatan dalam merumuskan kebijakan, dan merancang program yang responsif terhadap kondisi permasalahan daerah perbatasan. Untuk itu maka studi awal tentang daerah perbatasan menjadi penting, sebelum dirumuskan kebijakan maupun rancangan program yang responsif sesuai dengan kondisi yang ada.

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Teridentifikasinya permasalahan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) daerah perbatasan; (2) Teridentifikasinya potensi dan sumber daya dapat mendukung pembangunan masyarakat daerah perbatasan; (3) Terumuskannya alternatif/pilihan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah perbatasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan menggambarkan kondisi obyektif kehidupan masyarakat daerah perbatasan pada aspek: sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi upaya pengembangan masyarakat perbatasan, serta alternatif program yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi setempat.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Pemilihan lokasi ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan antar negara; komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain di Indonesia sangat terbatas. Ada beberapa wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Bengkayang, namun karena berbagai keterbatasan maka dipilih (satu) lokasi penelitian, yakni: Desa Jagoi - Kecamatan Jagoi Babang.

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terfokus (FGD) dalam sebuah tempat yang bersifat informal. Pesertanya terdiri dari anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peserta FGD tidak lebih dari 15 orang. Dengan jumlah peserta yang terbatas tersebut diharapkan semuanya dapat berkontribusi mengemukakan pendapatnya.

Output yang diharapkan dari FGD adalah: teridentifikasinya sejumlah informasi tentang keadaan dan kondisi berbagai aspek kehidupan desa, masalah sosial dan kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat sendiri, serta potensi lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya pengembangan kegiatan masyarakat.

Selain itu dilakukan pula wawancara dengan beberapa informan, antara lain warga masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan wawancara dilakukan baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dilakukan di warung, pasar, dan tempat-tempat di mana penduduk melakukan aktivitas.

Penetapan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kondisi setempat, yakni oleh para perwakilan dari beberapa dusun yang ada di Desa Jagoi. Oleh karena itu kriteria tersebut lebih bersifat lokal. Begitu pula dengan kebutuhan program penanganan yang sesuai dengan kondisi setempat. Dengan demikian diharapkan program-program yang dirancang benar-benar merupakan respon terhadap kondisi obyektif permasalahan lokal.

Berdasarkan kriteria dimaksud, pendataan atau pencatatan terhadap PMKS yang ada di lokasi penelitian dilakukan peneliti bersama

warga setempat, sehingga siapa PMKS, di lokasi mana, dan jumlah atau populasinya bisa diketahui secara pasti “*by name by address*”. Sementara itu informasi tentang sumber daya desa diperoleh melalui wawancara dengan para tokoh, observasi, dan dokumentasi yang ada di desa dan kecamatan. Begitu pula dengan informasi tentang program-program yang pernah masuk ke desa yang bersangkutan.

Untuk menunjang informasi dilakukan pula wawancara dengan beberapa instansi di daerah yang diperkirakan mempunyai informasi yang dibutuhkan, seperti: Instansi Sosial Provinsi, Instansi Sosial Kabupaten, dan Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten.

Analisis data dilakukan dengan cara menyusun data berdasarkan atas golongan dalam pola atau kategori. Selanjutnya dilakukan interpretasi guna memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori. Dengan cara itu diharapkan gejala-gejala yang kompleks dapat dideskripsikan dan dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Kecamatan Jagoi Babang

Jagoi Babang termasuk kecamatan dengan jarak dari kota kabupaten terjauh ketiga setelah Kecamatan Siding dan Kecamatan Sungai Raya. Saat ini Jagoi Babang terterdiri dari 6 desa yakni : Gersik, Semunying Jaya, Jagoi, Sekida, Kumba, dan Sinar Baru. Dari sejumlah desa ini, Sinar Baru merupakan desa terjauh dari Kantor Pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang. Sedangkan desa terdekat adalah Desa Jagoi yang berada di pusat kecamatan.

Secara geografis letak Jagoi Babang berada pada garis lintang $1^{\circ}15'16''\text{LU}-1^{\circ}30'00''\text{LU}$ dan garis bujur pada $109^{\circ}34'35''\text{BT}-109^{\circ}59'27''\text{BT}$. Batas wilayah administratif kecamatan Jagoi Barang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Negara bagian Serawak-

Malaysia Timur, sebelah Selatan dengan Kecamatan Seluas, sebelah Timur dengan Kecamatan Siding, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Sambas.

Jagoi Babang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkayang, yakni sebesar $655,00 \text{ km}^2$ atau sekitar $12,14\%$ dari luas Bengkayang. Dari sejumlah desa yang ada di jagoi Babang, desa yang terbesar adalah Desa Sinar Baru yang luasnya 250 km^2 . Sedangkan desa yang terkecil yaitu Desa Jagoi yang luasnya $21,69 \text{ km}^2$. (Sumber : BPS Kecamatan Jagoi Babang 2009)

Kecamatan Jagoi Babang ini secara klimatologi memiliki curah hujan yang tinggi hingga mencapai 273 mm . Curah hujan ini dipengaruhi oleh letak kecamatan tersebut dalam wilayah tropis (dengan ciri hujan tropis yang cukup lebat dan kelembaban udara yang tinggi). Jumlah hari hujan yang paling banyak adalah pada bulan Januari dan November sedangkan yang paling sedikit adalah pada bulan Agustus.

Jumlah dusun yang ada di Jagoi Babang saat ini seluruhnya 15 dusun, yakni : Desa Semunying Jaya (2 Dusun, 2 RT), Desa Gersik (3 Dusun, 7 RT), Desa Sinar Baru (4 Dusun, 3 RT), Desa Kumba (4 Dusun, 4 RT), Desa Sekida (3 Dusun, 8 RT), dan Desa Jagoi (3 Dusun, 8 RT).

Penduduk Kecamatan Jagoi Babang pada akhir tahun 2008 adalah sebanyak 6.940 jiwa, yang terdiri dari 3.501 jiwa laki-laki, dan 3.439 jiwa perempuan, serta jumlah KK sebanyak 1.325 KK. Kepadatan penduduk Kecamatan Jagoi Babang termasuk terendah di Bengkayang, yakni 11 jiwa per kilometer persegi (tertinggi Kecamatan Sungai Raya 252 jiwa/km^2). Jika dilihat dari setiap desa yang ada di Jagoi Babang, kepadatan tertinggi Desa (45 jiwa/ km^2), dan terendah Desa Sinar Baru (3 jiwa/ km^2).

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Jagoi Babang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jagoi	1.156	1.147	2.303
Sekida	769	746	1.525
Kumba	560	565	1.125
Sinar Baru	339	317	656
Gersik	510	488	998
Semuning Jaya	167	176	343
Jumlah	3.501	3.439	6.940

Sumber : Data BPS Kecamatan Jagoi Babang

Sarana pendidikan yang ada di Jagoi Babang menurut catatan monografi kecamatan, dan penjelasan Camat, ada beberapa sekolah yakni : 15 SD, 2 SLTP dan 1 SLTA. Jumlah murid yang ada pada sekolah tersebut meliputi : 1.179 siswa SD, 182 siswa SLTP, dan 94 siswa SLTA. Sedangkan jumlah guru di tiap sekolah meliputi : 85 guru SD, 19 guru SLTP, dan 17 guru SLTA.

Untuk menangani masalah kesehatan di Kecamatan Jagoi Babang sudah cukup tersedia sarana kesehatan, seperti: 1 Puskesmas utama, 3 Puskesmas pembantu, 3 Polindes, dan 2 Puskesmas keliling. Tenaga medis yang ada di kecamatan ini meliputi: 1 orang dokter, 2 orang bidang, dan 4 orang mantri kesehatan. Namun pada saat ini penyebaran petugas kesehatan belum tersebar merata disetiap desa. Hambatan yang dialami penduduk untuk menjangkau sarana kesehatan adalah faktor jarak, kondisi jalan, dan minimnya sarana transportasi umum. Bagi penduduk yang cukup mampu sering berobat di Negara tetangga (RS Tibilen, Kucing, Malaysia), karena jarak dan sarana transportasinya cukup memadai.

Desa Jagoi

1. Geografis

Desa Jagoi terdiri dari 3 dusun yakni Sei Take, Risau, dan Jagoi. Dari tiga dusun tersebut yang terpadat adalah Dusun Risau. Sedangkan dusun yang terdekat dengan perbatasan Indonesia -

Malaysia adalah Dusun Jagoi. Pada beberapa halaman berikut dapat dilihat peta tiga dusun tersebut. Peta dimaksud dibuat bersama warga setempat, dan tidak menggunakan skala yang sebenarnya; gambar peta dimaksud hanya ingin menunjukkan pola dan sebaran pemukiman serta infrastruktur lainnya di tiap dusun.

Batas Desa Jagoi sebelah Timur dengan Serawak (Malaysia), sebelah Barat dengan Kecamatan Seluas, sebelah Utara Desa Sekida, sebelah Selatan Kecamatan Siding. Luas Desa Jagoi seluruhnya sekitar 2.500 Ha, terdiri dari tanah hunian, ladang, kebun, dan hutan. Wilayah Desa Jagoi ini sebagian besar merupakan daerah berbukit-bukit, dan karena itu areal ladang dan kebun relatif cukup luas.

Sebelum tahun 1997 Desa Jagoi ini merupakan salah satu desa bagian dari wilayah Kecamatan Seluas. Setelah adanya pemekaran baru, yakni pembentukan Kecamatan Jagoi Babang, maka desa ini merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang. Oleh karena itu sarana yang ada seperti sekolah dan sarana kesehatan relative lebih lengkap di banding lima desa lainnya di Jagoi Babang. Sebagai sebagai pusat kecamatan, Jagoi mempunyai kelebihan dibanding desa lainnya.

Secara geografis, Desa Jagoi ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Serawak). Oleh karena itu di desa ini terdapat "border", meskipun belum tertata secara rapi sebagaimana yang ada wilayah lain (misalnya di Entikong - Sanggau).

2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Jagoi seluruhnya 1846 jiwa, terdiri dari 1052 laki-laki dan 794 perempuan, dan dengan jumlah seluruhnya 333 KK. Penduduk Desa Jagoi terdiri dari mayoritas

penduduk asli (suku Dayak Bedayuh) dan suku pendatang (suku Dayak lainnya, Melayu, Jawa, Bugis, dan suku-suku lainnya). Suku Bedayuh ini pada mulanya berasal dari wilayah Malaysia; dan oleh karena itu jumlah terbanyak suku ini berada di Malaysia. Terkait dengan kondisi tersebut, antara suku Bedayuh perbatasan dengan suku Bedayuh di Malaysia sebagian besar mempunyai hubungan kekeluargaan. Hingga kini mereka masih sering berkunjung, baik untuk urusan ekonomi maupun urusan hubungan kekerabatan. Untuk keperluan ini pemerintah desa/kecamatan setempat memfasilitasi dengan dokumen berupa Pas Lintas Batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak/batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas.

3. Sosial Budaya

Budaya suatu penduduk merupakan salah satu kondisi yang dapat mendukung dan menghambat proses pembangunan suatu wilayah. Hasil wawancara dan observasi di lapangan, budaya penduduk Jagoi yang positif dan masih dijunjung dengan baik adalah penghormatan terhadap milik orang lain. Bagi masyarakat Dayak, pantang merebut/merubah batas tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemilik, demikian pula dengan tanaman padi biar segelintirpun pantang mereka untuk mengambilnya, karena hal ini akan membawa keburukan bagi kehidupan keluarga dan keturunannya. Mereka juga tidak mudah digerakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya protes atau demo) tanpa mengetahui keuntungan yang bisa mereka peroleh. Sikap protes terhadap orang-orang atau pemimpin desa yang mereka anggap kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, hanya dalam bentuk sikap tidak suka, masa bodoh, tidak mempedulikan perintah atau kebijakannya dan berbagai sikap apriori lainnya. Sikap positif lainnya adalah sikap terbukanya untuk menerima

penduduk pendatang dan menerima perubahan. Mereka mudah menerima perubahan, terutama bila disertai bukti nyata yang memberikan keuntungan dan kemajuan bagi mereka.

Kebiasaan negatif yang masih hidup hingga kini adalah kebiasaan minum-minuman keras (baik untuk alasan kesehatan ataupun mabuk-mabukan), dan berjudi (baik judi lokal maupun judi buntut dari negara tetangga). Di beberapa tempat tertentu (umumnya warung kopi dan minuman lainnya) ketika hari mulai menjelang malam sampai larut malam banyak berkumpul warga untuk bermain judi.

Masuknya agama baru, utamanya Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, tampaknya belum mampu merubah kebiasaan negatif tersebut. Perubahan yang tampak menurut tokoh setempat, adalah dalam hal kegiatan sosial keagamaan dan dalam hal adat pernikahan sudah dilakukan dan dicatat melalui Gereja. Hal yang unik pada penduduk asli adalah tidak adanya kebiasaan menyelenggarakan pesta pernikahan. Pesta yang terjadi hanya berupa pesta adat tiap tahun, yang mereka sebut "Gawe". Pesta ini dilakukan pada pertama musim membuka ladang, yakni sekitar bulan enam (bulan Juni).

4. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada berupa sebuah Puskesmas yang dilengkapi dengan Instalasi Rawat Inap dengan kapasitas 8 tempat tidur (1 ruang digunakan untuk ruang rotgen). Jumlah tenaga kesehatan yang juga cukup memadai, kecuali dokter hanya satu orang; sedangkan lainnya yakni perawat 23 orang (3 diantaranya perawat gigi), bidan 8 orang, tenaga farmasi 2 orang, tenaga gizi 2 orang, dan tenaga sanitasi 2 orang.

Jenis penyakit yang banyak diderita penduduk berdasarkan catatan orang yang

berobat, adalah penyakit Ispa (infeksi saluran pernafasan) dan diare. Pada penduduk usia lanjut umumnya mengalami gangguan penyakit jaringan otot seperti reumatik. Hambatan yang dialami dalam pelayanan kesehatan penduduk adalah bila diperlukan rujukan ke Rumah Sakit. Hambatan tersebut utamanya menyangkut transportasi, baik biaya maupun jarak yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang rusak berat.

5. Agama/Kepercayaan

Penduduk Desa Jagoi sebagian besar beragama Kristen (Protestan dan Katolik), dan sebagian kecil lainnya beragama Islam. Saat ini telah berdiri 5 (lima) buah Gereja yang tersebar di tiga dusun dan sebuah mesjid di wilayah Dusun Jagoi. Dalam kehidupan beragama selama ini mereka selalu rukun, tidak pernah terjadi konflik antar agama, bahkan ada satu keluarga yang anggotanya terdiri dari Kristen dan Muslim.

Dalam penguburan jenazah, saat ini telah tersedia pemakaman umum di tiap dusun, namun masih terbatas pada pemakaman untuk umat Kristen. Untuk pemakaman umat Muslim hingga kini belum tersedia di Desa Jagoi. Bila ada warga Muslim yang meninggal sementara ini dikuburkan di wilayah Kecamatan Seluas yang berjarak sekitar 7 km. Dalam diskusi kelompok terfokus muncul keinginan warga muslim untuk mempunyai tempat pemakaman di Desa Jagoi. Tampaknya warga lain mendukung keinginan tersebut dan akan musyawarahkan hal itu secara bersama.

Sumber Daya Desa Jagoi

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang cukup besar di Desa Jagoi adalah tanah ladang, kebun dan hutan. Hasil utama kebun di Desa Jagoi adalah karet, kelapa sawit, dan sahang/lada. Untuk

perkebunan kelapa sawit saat ini ada yang dikelola warga secara perorangan (sebagian baru mulai tanam), maupun yang dikelola perusahaan (sudah mulai panen). Ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Jagoi seperti PT DJI, PT Led Lestari, PT Wirata, PT Aset Pasifik Internasional, PT WKN, dan PT Ceria Prima. Perusahaan-perusahaan ini ada yang menggunakan sebagian tanah penduduk maupun tanah hutan. Hingga kini belum ada kesepakatan tentang persentase keuntungan yang bisa diberikan kepada desa untuk kesejahteraan penduduk. Tidak seperti di daerah lain misalnya di Jawa Tengah (pengalaman peneliti di Kabupaten Rembang), pada desa-desa pinggiran hutan dibentuk Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) yang bertugas mengatur penggunaan tanah hutan oleh penduduk, termasuk kesepakatan dengan pengelola hutan (dalam hal ini PT Perhutani) untuk berbagi hasil dari penjualan hasil hutan (kayu jati) untuk desa setempat yakni sekitar 2% dari hasil penjualan.

Bagi penduduk Desa Jagoi keberadaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan penduduk sekitar. Apalagi bagi perusahaan yang menggunakan sebagian tanah penduduk belum ada kejelasan tentang pembagian hasil yang diperoleh para pemilik tanah.

Sumber daya alam yang saat ini memberikan manfaat dan telah dikelola dengan baik adalah sumber air bersih bagi penduduk, yang dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah penduduk. Sumber daya alam lain seperti hasil sungai berupa pasir sudah mulai digali oleh sebagian penduduk, namun jumlahnya masih terlalu kecil dan merupakan kegiatan tambahan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Desa Jagoi saat

ini sebagian besar masih rendah (pendidikan SMP ke bawah). Masih sangat sedikit mereka yang bisa melanjutkan pada tingkat SLA maupun perguruan tinggi. Hal ini terjadi baik karena kurang kemampuan penduduk untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi, maupun karena kurang pemahannya penduduk tentang pentingnya pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Bila dilihat dari sarana pendidikan yang ada sebenarnya cukup memadai. Saat ini di Jagoi terdapat 3 buah SD negeri, dua buah SMP Negeri dan sebuah SMA Negeri.

Sumber daya manusia yang dimiliki dan bisa dikembangkan saat ini adalah keterampilan menganyam “Bidai”, yakni sejenis tikar yang terbuat dari kulit rotan. Hambatan yang ada saat ini adalah dalam hal memperoleh bahan baku. Bahan baku lokal sudah mulai langka karena tidak ada upaya penduduk untuk menanam kembali rotan yang telah mereka panen. Oleh karena itu bahan baku saat ini harus didatangkan dari daerah lain (Kalimantan Selatan), dengan konsekuensi biaya yang besar.

Kemampuan warga untuk memproduksi kerajinan “bidai” cukup memadai, yakni dalam satu hari tiap orang dapat menyelesaikan hingga 5 (lima) buah “bidai” ukuran sekitar 2,5x4 meter. Modal untuk tiap “bidai” menurut pengrajin, per helai sekitar Rp 300 ribu, dengan nilai jual sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu per helai.

Pemasaran hasil kebun dan kerajinan rakyat saat ini masih banyak tertuju ke wilayah negara tetangga (Malaysia), terutama pada hari pasaran yakni tiap Sabtu dan Minggu yang berlokasi di wilayah Malaysia (Serikin). Banyak pedagang dari kota lain seperti Pontianak, Sambas, dan Singgkawang juga membawa dagangannya ke pasar tersebut. Biasanya mereka mulai berbondong-bondong masuk pada hari Jumat sore.

3. Sumber Daya Sosial

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagian besar penduduk Jagoi Babang adalah suku Dayak. Pada masyarakat Dayak umumnya peran dan pengaruh tokoh adat di kalangan penduduk cukup besar. Begitu yang terjadi pada masyarakat Jagoi, hingga kini keberadaan tokoh adat masih diakui masyarakat, terutama dalam penyelesaian perselisihan antar warga maupun dengan suku lainnya, serta memimpin dalam upacara adat. Penetapan tetua adat atau tokoh adat dilakukan baik melalui musyawarah maupun melalui jalur keturunan. Biasanya yang dipilih mereka yang tergolong senior (usia paling tua) dan dianggap mempunyai kemampuan sebagai tetua adat. Keberadaan tokoh adat ini sebenarnya cukup strategis untuk memacu gerak masyarakat dalam memajukan daerahnya. Namun sayangnya hingga kini potensi ini belum mampu digerakkan terutama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, peran mereka masih terbatas pada kegiatan adat kepercayaan.

Kegiatan sosial seperti kerja bakti membersihkan lingkungan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Kegiatan gotong royong saling menolong yang masih dipelihara dengan baik adalah perhatian dan bantuannya pada warga yang mengalami musibah kematian. Pada saat tetangga mempunyai acara/khajatan biasanya mereka akan datang memberikan bantuan bahan makan maupun bantuan tenaga. Namun demikian ada kebiasaan mereka untuk tidak mau untuk menikmati makanan tanpa adanya undangan dari tuan rumah. Oleh karena itu biasanya yang punya acara akan menyampaikan undangan sebelumnya.

Keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT),

tidak tampak pada masyarakat Jagoi Babang. Oleh karena itu gerakan-gerakan usaha kesejahteraan sosial juga belum tampak dalam kehidupan masyarakat, kecuali kegiatan-kegiatan yang memang secara tradisional sudah lama dipelihara oleh masyarakat. Sampai penelitian ini dilakukan, pemahaman masyarakat tentang program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial masih sangat kurang; termasuk pengetahuan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sumber daya sosial yang mungkin dapat dikembangkan adalah yang bersumber dari budaya adat leluhur dan keagamaan (Agama Kristen). Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi penting dalam meningkatkan kemajuan masyarakat Jagoi Babang.

4. Sumber Daya Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Jagoi sebagian besar bidang pertanian ladang dan kebun. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah Jagoi yang berbukit-bukit dan banyaknya tanah perkebunan dan pertanian (ladang).

Pola perladangan yang sementara ini masih dilakukan penduduk adalah ladang berpindah. Hingga kini pengetahuan pengelolaan lahan yang menetap masih sangat kurang, kecuali pada beberapa penduduk pendatang. Demikian pula dalam hal perkebunan (seperti karet dan kepala sawit) sering mengikuti pola lama, menanam dan kemudian ditinggalkan tanpa perawatan yang rutin dan intensif. Oleh karena itu kualitas tanaman perkebunan sering menjadi rendah. Hasil ladang terutama yang berupa padi, biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Mereka menjual padi kecuali ada kelebihan dari konsumsi yang dibutuhkan keluarga mereka.

Sebagian penduduk lainnya mengais rejeki di wilayah perbatasan dengan memberikan jasa

angkutan “ojek” ke wilayah perdagangan (di daerah Serikin, Malaysia). Untuk jasa angkutan ini mereka memungut biaya antara 10 sampai dengan 20 ringgit Malaysia, tergantung dari jumlah barang yang dibawa penumpang. Operasi mereka diatur oleh suatu organisasi yang mereka dirikan, sehingga tidak terjadi persaingan dalam mendapatkan penumpang.

Pasar yang cukup ramai didatangi pedagang baik dari Jagoi Babang maupun wilayah lain di Kalimantan Barat, adalah Pasar Serikin (tiap Sabtu dan Minggu). Biaya yang harus dikeluarkan para pedagang cukup tinggi, yakni menurut pengalaman mereka, biaya sewa tempat sekitar 15 ringgit/hari, bayar restribusi 3 ringgit/hari, penginapan 15 ringgit/perhari. Pada saat masuk wilayah Malaysia sering ada pungutan liar di jalan sekitar 1-2 ringgit tergantung banyaknya barang yang dibawa, sehingga total pengeluaran perhari rata-rata tiap pedagang sekitar 32 ringgit/hari. Keberadaan Pasar Sabtu dan Minggu telah banyak memberikan pemasukan bagi Malaysia. Bagaimana bila pemerintah daerah perbatasan menyediakan fasilitas pasar Sabtu-Minggu di wilayah kita (Indonesia)? Tentunya hal ini akan memberikan masukan daerah dan keuntungan penduduk perbatasan yang cukup besar, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk perbatasan mempunyai ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga. Kondisi tersebut lebih memberi keuntungan bagi masyarakat di negara tetangga. Untuk itu pembukaan border, kemudahan jalur komunikasi dengan negara tetangga sebenarnya kurang menguntungkan secara ekonomi, sosial, maupun politik. Peningkatan akses komunikasi dan perdagangan dengan wilayah dalam negeri sebenarnya merupakan pilihan yang lebih menguntungkan.

Permasalahan Sosial Desa Jagoi

Berdasarkan hasil diskusi, wawancara dan observasi di lapangan ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat daerah perbatasan, yakni:

1. Sarana dan prasana infrastruktur jalan penghubung dan transportasi umum yang belum memadai menjadi penghambat jaringan komunikasi dan perekonomian dengan sumber-sumber yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi jalan menuju Desa Jagoi dan ke perbatasan banyak mengalami kerusakan cukup parah. Transportasi umum dari kota kabupaten ke kecamatan/desa Jagoi masih sangat terbatas. Saat ini transportasi yang ada baru sampai Kecamatan Seluas yang berjarak sekitar 6-7 KM dari Desa/ Kecamatan Jagoi Babang. Untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Jagoi banyak bergantung pada Pasar Seluas. Untuk mencapai Pasar Seluas harus menggunakan sepeda motor atau ojek dengan biaya sekitar Rp 10 ribu sekali jalan.
2. Masih ada kebiasaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ladang berpindah. Masyarakat kurang keterampilan untuk mengelola perkebunan secara baik. Ada kebiasaan untuk tidak merawat tanaman perkebunan secara baik. Banyak kebun karet maupun kelapa sawit yang kurang terawat.
3. Adanya sikap ketergantungan masyarakat yang cukup besar terhadap bantuan pemerintah. Kemampuan swadaya pada sebagian besar masyarakat masih rendah.
4. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi masih hidup di kalangan masyarakat terutama penduduk laki-laki (pemuda maupun orang dewasa).
5. Banyak anak/remaja putus sekolah terutama perempuan yang bekerja di Malaysia, memamerkan keberhasilannya, sehingga mendorong para remaja putri dan orangtua untuk lebih memilih berhenti sekolah dan bekerja di Malaysia daripada harus bersusah payah membiayai pendidikan anak. Menurut informasi dari beberapa tokoh masyarakat setempat, banyak (mereka tidak bersedia menyebut jumlahnya) dari para pekerja wanita ke Malaysia disamping membawa hasil juga membawa masalah (hamil di luar nikah), sehingga menjadi beban keluarga.
6. Ada perasaan cemburu di kalangan penduduk asli, yakni kenyataan banyak pegawai instansi di perbatasan yang berasal dari pendatang. Mereka berharap agar ada kesempatan putra perbatasan untuk menjadi pegawai di wilayah perbatasan. Menurut mereka pemerintah daerah pernah menjanjikan untuk mengangkat putra daerah, namun hingga kini belum ada realisasi. Kondisi ini bila tidak mendapat perhatian bisa menimbulkan konflik di kemudian hari; atau paling tidak akan muncul sikap yang kurang kooperatif dengan petugas setempat.
7. Ada pendapat di kalangan penduduk asli bahwa program Negara tetangga dianggap lebih baik dibandingkan program bantuan pemerintah Indonesia. Kondisi yang demikian bila tidak mendapat perhatian dari pemerintah, dapat mengurangi kepercayaan penduduk terhadap program-program pemerintah yang masuk ke desa.
8. Infrastruktur kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat ikut berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, seperti pekerja sosial masyarakat (PSM) maupun relawan sosial dan karang taruna (KT) tidak tampak keberadaannya. Menurut warga setempat karang taruna pernah ada, tapi kemudian menghilang begitu saja. Hal ini antara lain menurut mereka karena kurangnya pembinaan dari instansi Pembina. Kondisi yang demikian memunculkan gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial oleh penduduk sangat rendah. Demikian pula dengan pengetahuan dan pemahaman penduduk terhadap

sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa diakses oleh mereka.

9. Dari hasil pendataan yang prosesnya dibantu penduduk setempat, permasalahan kesejahteraan sosial yang banyak dihadapi penduduk adalah masalah kemiskinan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terbanyak fakir miskin 88 KK, berikutnya lanjut usia terlantar 37 orang, wanita rawan sosial ekonomi 22 orang, dan anak putus sekolah 25 orang, serta rumah tidak layak huni yang banyak ditempati oleh keluarga miskin.

Tabel 2 : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Desa Jagoi

Jenis PMKS	Kriteria Lokal	Jumlah/ Populasi
1	2	3
Anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Usia 2 - 18 tahun • Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya • Orangtua tidak mampu 	9
Anak Putus Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • SMP tidak tamat atau tamat • Usia 16 - 18 tahun • Kegiatan bantu kerja orangtua • Kegiatan bertani 	25
Penyandang cacat	<ul style="list-style-type: none"> • Usia anak atau dewasa • Pendidikan tertinggi SD atau tidak sekolah • Umumnya cacat sejak lahir (bawaan) • Kegiatan bertani 	25
Lanjut Usia Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Usia 65 tahun ke atas • Mayoritas Janda • Tinggal numpang di rumah family. 	37
Keluarga Fakir Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tani ladang berpindah • Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan • Tempat tinggal umumnya tidak layak huni. 	88
Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi bangunan tidak memadai • Rata-rata penghuni rumah 5- 6 orang • Ukuran rumah rata-rata 4x6 m². 	8

1	2	3
Wanita rawan Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai suami (janda) • Usia produktif (tidak lebih dari 45 th) • Penghasilan tidak tetap • Kebutuhan hidup keluarga kurang mencukupi • Mempunyai anak yang menjadi tanggungan 	22

10. Ada permasalahan lain yang sebenarnya masih tersembunyi dan kemungkinan berkembang adalah penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba. Tokoh masyarakat mensinyalir adanya warga yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan obat dan narkoba, namun belum bisa menyebutkan siapa dan berapa jumlah secara pasti.

Program yang ada di Desa Jagoi

Menurut informasi dari aparat desa, aparat kecamatan dan penduduk setempat, telah banyak program pemerintah yang telah masuk dari berbagai instansi, baik berupa pemberdayaan masyarakat dalam bentuk ternak maupun bantuan bibit tanaman, dan bantuan bahan bangunan untuk perbaikan rumah. Namun pada saat studi ini dilakukan sudah tidak terlihat perkembangan atau hasilnya. Menurut mereka banyak bantuan ternak yang tidak berkembang, bahkan mati, baik karena keterampilan mereka yang kurang memadai untuk memelihara ternak, maupun kualitas bantuan yang kadang-kadang kurang/rendah. Ternak yang biasa dipelihara penduduk saat ini adalah ternak babi.

Menurut beberapa tokoh kelemahan dari bantuan yang ada, disamping kualitasnya juga kurangnya penyiapan dan bimbingan oleh instansi kepada masyarakat selama mengelola bantuan. Pengalaman kegagalan tersebut memunculkan pendapat masyarakat tentang bagaimana sebaiknya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat

perbatasan. Mereka mengharapkan bahwa bantuan tersebut perlu diberikan secara tuntas, mulai dari pemberian bibit, pakan/atau pupuk dan obat-obatan, sampai hasilnya bisa mereka petik. Selama ini ada kesan bahwa program bantuan yang ada seperti menjatuhkan sesuatu, dan masyarakat diharapkan dapat menangkap, tanpa ada kepedulian apakah bantuan yang ada dapat berkembang atau memberi manfaat bagi penduduk.

Program-program bantuan yang diharapkan penduduk bagi anak/remaja putus sekolah dan pemuda, adalah dalam bentuk pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut dilakukan baik di tempat (desa yang bersangkutan) maupun di lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah, sebagai mana yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut mereka, keterampilan yang nyata memberikan manfaat bagi masyarakat adalah keterampilan bidang pertanian, perikanan, dan pelatihan perbengkelan/ otomotif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa masih ada budaya masyarakat Jagoi yang cukup positif dan juga ada yang bersifat negatif yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Sikap positif penduduk terutama keterbukaan bagi masuknya pendatang, dan mudah menerima perubahan.
2. Sebagaimana ciri daerah tertinggal, permasalahan kesejahteraan yang menonjol di daerah perbatasan adalah masalah kemiskinan dan keterlantaran.
3. Sumber pelayanan masyarakat yang bisa dijangkau penduduk seperti sarana pendidikan dan kesehatan sebenarnya cukup memadai, namun belum seluruh penduduk memanfaatkan sarana tersebut secara optimal.

4. Sumber daya alam yang ada terutama di sektor pertanian dan perkebunan sebenarnya cukup besar, tetapi belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan penduduk. Sebagian besar penduduk masih sangat kurang menguasai pengetahuan yang lebih maju dalam pengolahan pertanian dan perkebunan.
5. Sumber daya kesejahteraan sosial masih sangat minim; penduduk masih kurang pengetahuan dan bimbingan tentang sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa dijangkau.
6. Sarana infrastruktur desa yang dapat mempercepat kemajuan penduduk seperti sarana jalan kabupaten ke desa, jalan antar desa, dan sarana angkutan umum yang dapat dijangkau masyarakat masih kurang memadai. Sementara itu dari pengamatan dan pengalaman ke desa perbatasan lainnya; untuk Desa Jagoi sebenarnya merupakan jalur terpendek dengan kota propinsi dibanding wilayah perbatasan lainnya. Karena itu jalur ini sebenarnya cukup potensial bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan wilayah perbatasan dengan wilayah lain di dalam negeri. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan mereka pada negara tetangga.

Saran

1. Diperlukan kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan seperti halnya Jagoi Babang, dengan merancang program dan kegiatan yang nyata dan dirasakan penduduk memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu maka pada setiap program yang masuk perlu dilengkapi dengan bimbingan yang intensif dan kontinyu, mulai dari penyiapan masyarakat, bimbingan teknis selama proses, dan bimbingan pemanfaatan atau pemasaran hasil.

2. Program-program kesejahteraan sosial yang diperlukan bagi penduduk perbatasan, khususnya Jagoi Babang (seperti matrik terlampir) antara lain: (a) Program penyuluhan sosial yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa diakses penduduk; termasuk bahaya narkoba bagi generasi muda, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial; (b) Program pemberdayaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi melalui KUBE maupun perbaikan rumah tidak layak huni; (c) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi wanita hamil dan mempunyai anak usia sekolah SD sampai SMP; (d) Program Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat; (e) Program pelatihan keterampilan praktis bagi anak/remaja putus sekolah dan pemuda.
- c. Program sektor lain utamanya yang menyangkut perbaikan infrastruktur, dan program pengembangan usaha pertanian ladang dan perkebunan berupa bantuan bibit, dan bimbingan mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan sampai dengan memanen hasil dan pemasaran. Untuk ini pada setiap kegiatan perlu dipersiapkan tenaga pembimbing dan pendamping masyarakat.
- d. Program peningkatan akses daerah perbatasan dengan wilayah lain di dalam negeri (misalnya dengan wilayah induk Kabupaten Bengkayang) merupakan hal yang lebih penting daripada kebijakan pembangunan “Border Gate” (gerbang perbatasan). Kemudahan akses dengan negara lain akan mendorong penduduk perbatasan makin tergantung dengan negara lain, dan kenyataannya lebih menguntungkan bagi penduduk negara tetangga.

Matrik

Saran Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pembangunan sektor lain Di Wilayah Perbatasan antara Negara

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN : BENGKAYANG
 KECAMATAN/DESA : JAGOI BABANG, DESA JAGOI.

Masalah Prioritas yang akan diatasi	Nama Program/Kegiatan yang direkomendasikan	Tujuan/Target	Unit Pelaksana (Pusat)	Unit Pelaksana daerah (Propinsi & Kabupaten)
1	2	3	4	5
Tidak adanya dan tidak berfungsinya pilar-pilar partisipan (PSM, KT, dan Orsos).	<ul style="list-style-type: none"> Program penyuluhan sosial yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa diakses penduduk Program Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Desa daerah terpencil dan perbatasan: <ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan PSM/ relawan sosial di tiap dusun - Revitalisasi karang taruna (KT); pembinaan manajemen, dukungan operasional, dan bantuan UEP 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya PSM, minimal 1 orang perdusun (3 orang per desa) Tumbuhnya partisipasi orsos lokal dalam kegiatan UKS Berfungsinya KT dalam pembinaan generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Penyuluhan Sosial Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Provinsi (Bidang Pemberdayaan sosial) Dinas Sosial dan Naker Kabupaten (Bidang Kesos)
Masalah Kemsikinan dan ketertinggalan (88 KK fakir miskin dan 22 Wanita rawan sosek), serta rumah tak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> Program pemberdayaan fakir miskin dan wanita rawan sosek melalui KUBE maupun perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan secara individual; fungsi KUBE sebagai sarana komunikasi, pengembangan usaha, dan kelompok pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga wanita rawan sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Direktorat Pemberdayaan Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Provinsi (Bidang Pemberdayaan sosial) Dinas Sosial dan Naker Kabupaten (Bidang Kesos)
Masih adanya anak terlantar dan putus sekolah (9 terlantar, 25 putus sek.).	<ul style="list-style-type: none"> Program Keluarga Harapan (PKH) bagi anak-anak usia sekolah SD dan SMP. Program pelatihan keterampilan praktis bagi anak/remaja putus sekolah dan pemuda. Pelatihan ini dilakukan baik di tempat (desa yang bersangkutan), maupun di lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan partisipasi anak usia sekolah (terutama wajib belajar 9 tahun) Meningkatnya keterampilan praktis, dan anak/remaja putus sekolah dapat menggunakan dan mengembangkannya keterampilan guna meningkatkan kemandiriannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Pelayanan dan Rehabsos Korban Penyalahgunaan NAPZA Direktorat Perlindungan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Provinsi (Bidang Pemberdayaan sosial) Dinas Sosial dan Naker Kabupaten (Bidang Kesos)

1	2	3	4	5
Masih adanya sejumlah lanjut usia terlantar yang belum tersentuh oleh program/ pelayanan (37 jiwa)	Program Jaminan Sosial Lanjut Usia	Terjaminnya kebutuhan hidup para lanjut usia.	Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Provinsi (Bidang Pemberda-yaan sosial) • Dinsosl dan Naker Kab. (Bid. Kesos)
Masih adanya sejumlah penyandang cacat yang belum tersentuh program/kegiatan (25 jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Program jaminan sosial penyandang cacat (JSPaca) • Program UEP bagi penyandang cacat dan keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya kebutuhan hidup para penyandang cacat. • Peningkatan kesejahteraan penyandang dan keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jaminan Kesjahteraan Sosial • Direktorat Pelay. Dan Rehabsos. Penyandang cacat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Provinsi (Bidang Pemberdayaan sosial) • Dinsos dan Naker Kabupaten (Bidang Kesos)
<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada kebiasaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ladang berpindah. • Masyarakat kurang keterampilan untuk mengelola pertanian dan perkebunan secara baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan usaha pertanian ladang dan perkebunan. • Bantuan berupa bibit, dan bimbingan, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan sampai dgn memanen hasil dan pemasaran. • Untuk ini pada setiap kegiatan perlu dipersiapkan tenaga pembimbing dan pendamping masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penduduk dalam berladang dan berkebun • Hilang/berkurangnya kebiasaan penduduk untuk melakukan ladang berpindah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dep. Pertanian (Direktorat teknis terkait) • Dep. Kehutanan (Direktorat teknis terkait) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian Prop. & kabupaten • Dinas Kehutanan Prop. & Kab.
Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi masih hidup di kalangan masyarakat terutama penduduk laki-laki (pemuda maupun orang dewasa).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan bimbingan mental spiritual perlu lebih ditingkatkan terutama untuk mengurangi/ menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang menghambat dan merongrong kemajuan masyarakat. • Kegiatan dimaksud utamanya melalui peran Gereja dan Masjid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya kebiasaan buruk sebagian penduduk yang menghambat kemajuan masyarakat. • Meningkatnya ketaatan penduduk dalam menjalankan agamanya. 	Departemen Agama (Direktorat teknis terkait).	Kanwil/Kandep. Agama

1	2	3	4	5
Sarana dan prasana infrastruktur jalan dan transportasi umum yang belum memadai menjadikan penghambat jaringan komunikasi dan perekonomian dengan sumber-sumber yang dibutuhkan masyarakat.	Program sektor lain utamanya yang menyangkut perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan transportasi umum yang mudah dijangkau penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarana jalan dan transportasi penduduk • Meningkatnya jalur komunikasi penduduk dengan wilayah lain di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen PU • Departemen Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Prop. & Kabupaten • Kimpraswil
Belum adanya pasar yang mendukung perekonomian penduduk. Perekonomian penduduk masih bergantung pada Negara tetangga.	Pembangunan Pasar Tradisional yang berlokasi di Kecamatan Jagoi Babang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perekonomian penduduk • Mengurangi ketergantungan perekonomian penduduk terhadap negara tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Kabupaten
Belum tersedianya tempat pemakaman umum, khususnya bagi penduduk Muslim	Penyediaan lokasi pemakaman umum bagi penduduk Muslim di tiap dusun (minimal satu lokasi dalam satu desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tempat pemakaman umum bagi semua penduduk, baik muslim maupun non muslim. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Kabupaten • Kecamatan • Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, IR. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: UI-Press
- BPS, (2008). *Bengkayang Dalam Angka*, BPS Kabupaten Bengkayang
- Brenda D.B. & Miley K.K. (2005). *Social Work: An Empowering Profession*, Boston : Pearson Education Inc.
- C. Korten, D. (1982). *Pembangunan Berpusat pada Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Chaskin, R.J. (2001). *Building Community Capacity*, Walter de Gruyter, New York.
- Ginandjar K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES
- Ife, Jim, (2002). *Community Development*, Australia: Longman
- Huruswati, I., Sutaat, Purwanto, A.B., Pujianto, B. & Soeyoeti. (2009). *Studi Masalah, dan Sumber Daya Sosial Daerah Perbatasan dan Tertinggal*, Jakarta: Puslitbang Kesos
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bandung: Rineka Cipta
- Proyono, Onny S. dan AMW Pranarka, (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Siporin, Max, (1975). *Introduction to Social Work Practice*, New York: Mac Millan Phubliser Co. Inc.
- Suharto, Edi, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Suprayoga Hadi, DR., (2010). *Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Penanganan Daerah Tertinggal, Pulau Terdepan, dan Perbatasan Negara*; Bahan Paparan pertemuan di Kementerian Sosial tanggal 3 Maret 2010 di Jakarta.
- Suradi & Muhtar. (2008). *Penelitian masalah kebutuhan dan sumber daya masyarakat daerah terpencil (Kasus Miangas)*, Jakarta: Puslitbang Kesos